
**EFEKTIVITAS PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA SUNGAI GUNTING HILIR KECAMATAN RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ronal¹ Herman²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharudin

Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

ronal@student.uir.ac.id herman@uir.ac.id

Abstract

The livestock program is an effort by the village government to support improving community welfare through the provision of livestock seeds, provision of pens and feed, and providing counseling/socialization to livestock groups. This study aims to determine the effectiveness of the community empowerment work program in Sungai Guntung Hilir Village, Rengat District, Indragiri Hulu Regency and to determine the inhibiting factors in the effectiveness of the community empowerment work program in Sungai Guntung Hilir Village, Rengat District, Indragiri Hulu Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. Key informants and informants in this study are the village head, village secretary, village staff, head of the livestock program and members of the community receiving the program. The results of this study indicate that the community empowerment work program in Sungai Guntung Hilir Village, Rengat District, Indragiri Regency has not been effective. Because there are several obstacles found including the lack of counseling/socialization to the community in providing program information, the absence of criteria for the accuracy of targets for communities who are more deserving of the program, the lack of technical training in monitoring and evaluating the program, inadequate facilities and infrastructure, and a weak program monitoring and evaluation system. Nevertheless, this program is considered to provide benefits to the recipient community, especially those who are economically impacted and provides additional business opportunities through more productive use of yards and local resources.

Keywords: *Effectiveness, Program, Village, Livestock*

Abstrak

Program peternakan merupakan upaya pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengadaan bibit ternak, penyediaan kandang dan pakan, serta pemberian penyuluhan/sosialisasi kepada kelompok peternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program kerja pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam efektivitas program kerja pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Key informan dan informan pada penelitian ini adalah kepala Desa, sekretaris desa, staf pegawai desa, ketua program peternakan dan anggota masyarakat penerima program. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan program kerja pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri belum efektif. Karena terdapat beberapa hambatan yang ditemukan diantaranya kurangnya penyuluhan/sosialisasi ke masyarakat dalam pemberian informasi program, tidak terdapatnya kriteria ketepatan sasaran untuk masyarakat yang lebih layak mendapatkan program, kurangnya pelatihan teknis dalam mengawasi serta mengevaluasi program, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi program. Meskipun demikian, program ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan

memberikan peluang usaha tambahan melalui pemanfaatan pekarangan dan sumber daya lokal secara lebih produktif.

Kata kunci: Efektivitas, Program, Desa, Peternakan

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat memainkan peran penting sebagai strategi utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia. Desa, salah satu pemerintahan terkecil dari segi populasi, dibawah pemerintahan kecamatan, yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan rumah tangga dan membentuk tatanan sosial wilayah. Dalam keadaan seperti ini, desa memiliki kekuatan yang cukup dan merupakan tempat bagi masyarakat untuk menunjukkan kepentingannya dan memenuhi kebutuhannya. Setiap program kesejahteraan masyarakat pemerintah harus mampu mengatasi kemiskinan.

Pemerintah memosisikan desa sebagai aktor sentral dalam proses pembangunan, menggerakkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya secara mandiri. Dalam kerangka ini, sektor peternakan dipandang sebagai bidang strategis yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Karena desa memiliki sumber daya alam dan manusia yang mendukung pengembangan usaha peternakan, sektor peternakan dipandang sebagai bidang strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di tingkat desa, berbagai program peternakan dijalankan sebagai bagian penting dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang mengurus dan mengatur pemerintahan, kebutuhan masyarakat wilayah tersebut sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, ataupun hak tradisional yang telah mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari pemerintahan Indonesia. Pada umumnya, mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai peternak dan petani, keduanya bertanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. (Hermita et al., 2022). Pemanfaatan potensi ini tentunya menentukan seberapa berdaya suatu masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ialah usaha untuk meningkatkan martabat dan harkat masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Mutiaawardhana et al., 2013). Cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan adalah pemberdayaan. Menurut Umanilo, pemberdayaan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh keahlian dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa (Fitriana, 2020). Jadi, pemberdayaan masyarakat desa juga penting untuk meningkatkan mentalitas masyarakat untuk maju dan meningkatkan sumber daya manusia untuk bersaing di era milenial (Astuti, 2016).

Suharto mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Menurut Suharto, proses pemberdayaan didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan dan kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama lapisan masyarakat yang miskin. Sementara itu, tujuan pemberdayaan merujuk pada kondisi atau hasil yang tercapai dengan adanya perubahan sosial seperti masyarakat yang berdaya, berkuasa, berpengetahuan, dan berkembang biak, serta masyarakat yang makmur dan Makmur (Nurgiarta & Rosdiana, 2019). Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberdayaan masyarakat adalah Upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, perilaku, keterampilan, sikap, keahlian, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penentuan kebijakan, kegiatan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan utama masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, sikap, keahlian, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan utama masyarakat (Endah, 2020). Adapun aktivitas pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 79 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni dapat berupa peningkatan kemampuan pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka, pembangunan desa, penguatan kelembagaan desa, dan penguatan budaya yang fleksibel.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 (PP No. 6/2013) mengenai Pemberdayaan Peternak mendefinisikan pemberdayaan peternak yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, kemudahan, dan kemajuan bisnis, serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan peternak. Menurut PP No. 6/2013, pemberdayaan merupakan Pengaturan yang memberikan keringanan kepada peternak yang memiliki jumlah ternak di bawah batas usaha yang tidak membutuhkan perizinan (Amam & Soetrisno, 2022).

Masyarakat pedesaan di Indonesia sangat identik dengan sektor kegiatan pertanian termasuk di dalamnya peternakan. Pertanian ataupun peternakan merupakan sektor yang potensial dan mudah diakses oleh masyarakat pedesaan karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat desa dalam beternak memiliki karakteristik tersendiri. Peternakan biasanya tidak berskala besar, sehingga setiap rumah tangga di pedesaan setidaknya memelihara hewan ternak dalam jumlah kecil seperti ayam, itik, sapi, domba, dan kambing. Usaha peternakan saat ini lebih cenderung menggunakan sistem pemeliharaan tradisional. Hal ini ditandai dengan jumlah ternak yang dipegang rendah, keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan kurangnya pengetahuan tentang budi daya ternak. Peternak di peternakan rakyat di desa berbeda dalam pengetahuan mereka tentang budi daya ternak, yang disebabkan oleh cara pemeliharaan ternak tradisional yang dipegang oleh mereka (Ulfa, 2021).

Pemberdayaan pertanian dan peternakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Produksi di sektor ini dapat ditingkatkan secara signifikan melalui peningkatan kapasitas dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, dan kemudahan akses terhadap sumber daya yang ada. Peningkatan kapasitas ini berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan petani dan peternak, sekaligus mendorong perbaikan kondisi ekonomi desa secara keseluruhan. Pemberdayaan sektor ini juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah yang dihadapi masih cukup besar, terutama di daerah pedesaan. Ini termasuk akses yang terbatas terhadap teknologi dan informasi, kurangnya permodalan, dan kondisi infrastruktur yang kurang.

Secara umum, masyarakat yang beternak di pedesaan masih cenderung melakukan dengan cara liar, yaitu hewan ternak dibiarkan begitu saja atau tidak dipelihara dengan baik

(Sugiyono, 2020). Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak warga ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Hewan ternak warga ini juga sering dilihat di pinggir sungai, sehingga mereka jatuh ke dalam sungai (Fitriani, 2015).

Permasalahan di atas jelas menunjukkan bahwa beberapa kelompok masih menunjukkan tingkat kualitas dan produktivitas yang rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peternak tidak memahami cara beternak yang baik dan benar. Akibatnya, Hewan ternak tidak dapat berkembangbiak dengan baik, sehingga kelompok tani yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan bibit ternak tidak dapat menghasilkan hasil yang baik. Dari hal ini dapat di simpulkan Sebagian peternak tidak memanfaatkan program bantuan milik pemerintah Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat untuk memelihara hewan mereka.

Di Desa Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, masih ada beberapa masalah yang menghalangi distribusi bantuan bibit ternak. Program peningkatan produksi peternakan Sebagian gagal berkembang biak karena sebagian besar bibit yang disalurkan rentan terkena penyakit atau virus. Selain itu, ada kesalahan dalam penyaluran bantuan karena beberapa penerima bukanlah peternak aktif, tetapi muncul secara tiba-tiba tanpa riwayat peternakan yang jelas. Mungkin karena pertimbangan ekonomi mereka membutuhkan maka mereka ikut menerima bantuan program tersebut. Banyak penerima tidak mampu memelihara atau mengembangkan bibit ternak mereka karena situasi ini. Akibatnya, hewan ternak yang diperoleh dari program tersebut gagal atau tidak berkembang dengan baik di banyak penerima bantuan.

Secara umum, program pemberdayaan masyarakat melalui sektor peternakan telah diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki, termasuk dalam bidang peternakan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan arahan agar pemerintah desa dapat menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan berbasis potensi lokal, salah satunya melalui pengembangan peternakan rakyat. Di tingkat desa, peraturan desa (Perdes) tentang program peternakan juga telah banyak diterbitkan sebagai landasan hukum pelaksanaan program tersebut, termasuk di Desa Sungai Guntung Hilir.

Desa Sungai Guntung Hilir merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam bidang peternakan. Letak geografis yang strategis, ketersediaan lahan, serta tradisi masyarakat yang sudah mengenal usaha peternakan sejak lama, menjadi modal utama dalam pengembangan program peternakan di desa ini. Pemerintah desa telah menginisiasi berbagai program peternakan, seperti pemberian bibit ternak misalnya ,ayam,bebek, dan itik yang didukung oleh peraturan desa tentang program peternakan. Peraturan desa ini mengatur berbagai aspek, mulai dari tata cara pelaksanaan program, pembagian bantuan ternak, pelatihan bagi peternak, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peternakan , kurangnya pendampingan dari tenaga ahli, serta terbatasnya berbagai akses bagi hasil ternak masyarakat.

Dalam konteks regulasi, peraturan desa tentang program peternakan di Desa Sungai Guntung Hilir telah mengadopsi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Desa dan peraturan terkait lainnya. Peraturan desa tersebut menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, peraturan desa juga mengatur tentang pembentukan kelompok peternak, mekanisme pembagian bantuan, serta sistem pelaporan dan pertanggung jawaban. Namun, implementasi peraturan desa ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sosialisasi dan pengawasan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan peraturan desa, sehingga partisipasi mereka dalam program masih rendah. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga masih lemah, sehingga hewan ternak tidak dapat berkembang biak sebagaimana tujuan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat peran strategis program peternakan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dengan melakukan evaluasi tentang seberapa efektif program peternakan Desa Sungai Guntung Hilir, diharapkan dapat menemukan berbagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan program dan menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja program di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan pihak terkait membuat kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat melalui sektor peternakan. Ini akan memungkinkan program peternakan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa, secara efisien dan berkelanjutan.

Program peningkatan produksi hasil peternakan merupakan salah satu program inisiatif pemerintah Desa dilaksanakan Pemerintah Desa Sungai Guntung Hilir berdasarkan RKPDes/LPPD, dimana program ini ditujukan terutama untuk memacu produksi melalui kegiatan peningkatan produksi peternakan, pengadaan pengolah bahan pakan, pembuatan kandang, tempat pengelolaan pakan, dan pengadaan bibit peternakan seperti ayam, bebek itik dan lain sebagainya, di mana anggarannya bersumber dari APBDes. Selain program peternakan, masih terdapat berbagai program lain di bidang pemberdayaan masyarakat.

Peneliti melakukan penelitian terhadap program kerja pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan dan dijalankan di bawah kerangka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang berlaku di wilayah Desa Sungai Guntung Hilir. Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus memilih untuk memfokuskan kajian pada program pemberdayaan di sektor peternakan yang dilaksanakan di desa saya sendiri. Pemilihan fokus ini didasarkan pada fakta bahwa peternakan memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, peternakan dapat membantu kemajuan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dengan memilih lokasi penelitian di desa tempat saya tinggal, peneliti merasa lebih mudah dan leluasa untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data secara kontekstual dan mendalam. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami masalah, tantangan, dan kemungkinan yang ada di lapangan secara lebih komprehensif dan spesifik.

Masih banyak nya bantuan pemberian bibit hewan ternak yang tidak berkembang yang semestinya ini menjadi program untuk jangka Panjang meskipun hanya skala kecil untuk menambah pendapatan. Hal ini sangat di sayangkan jika program hanya berjalan tahun ke tahun namun tidak di kembangkan oleh Sebagian masyarakat desa Sungai Guntung Hilir. Kegiatan peternakan dari program peningkatan produksi hasil peternakan di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat yang merupakan bantuan dari pemerintah Desa Sungai Guntung Hilir dalam

meningkatkan peran sektor peternakan dalam perekonomian nasional. Kemudian diketahui bahwa masih ada nya kelompok yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat, karena masih banyak ditemui kelompok penerima pengadaan bibit peternakan mayoritasnya bukan sebagai kelompok peternak, melainkan kelompok yang disebut sebagai kelompok dadakan, Namun karena secara ekonomi mereka sangat membutuhkan tapi masyarakat tidak mengelola dengan baik program peternakan ini dapat terlihat dimana banyak kelompok yang sudah menerima namun gagal/tidak berhasil mengembangkan hewan ternak yang di berikan bantuan dari program peningkatan produksi hasil peternakan di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peternak kampung di desa Sungai Guntung Hilir tidak memahami tujuan program peternakan yang diberikan sebelum kegiatan program dimulai. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan pelatihan dan petunjuk peternakan yang diberikan pemerintahan desa

Oleh karena itu, pada masa yang akan datang, sebaiknya pemerintah desa harus sering mengadakan pertemuan untuk mensosialisasikan perkembangan peternakan di masa depan. Jangan hanya mengandalkan pemberitahuan awal program di mulai , pemerintah Desa Sungai Guntung Hilir juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan menerapkannya secara menyeluruh. Ini akan menghasilkan peningkatan produksi peternakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat.

Berdasarkan pra penelitian diatas, Masalah yang diperoleh yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas kelompok peternak tentang tata cara beternak yang baik dan benar akibatnya ayam dan itik tidak dapat berkembang biak dengan baik sehingga kelompok tani sebagai pengelola bantuan bibit ternak tidak optimal dalam mengembangkan hasil bantuan ternak ayam dan itik dan masih di temukan kelompok peternak yang gagal memelihara bantuan program tersebut.
2. Masih ada nya kelompok yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan di Desa Guntung Hilir , karena masih banyak ditemui kelompok penerima bantuan ternak ayam dan itik mayoritasnya bukan sebagai kelompok peternak, melainkan kelompok yang disebut sebagai kelompok dadakan, ini dapat terlihat dimana banyak kelompok yang sudah menerima namun gagal/tidak berhasil mengembangkan ayam dan itik dari program peningkatan produksi hasil peternakan di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari Permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengevaluasi Efektivitas program yang telah dijalankan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Peneliti ingin mengetahui apakah program peningkatan produksi hasil peternakan di Desa Sungai Guntung Hilir berjalan efektif atau tidak sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Efektivitas Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Studi kepustakaan

1. Konsep Administrasi Publik

Menurut H. A. Menurut H. A. Simon (Agus Hendra Yady, 2022:12), administrasi publik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pandangan Luther Gulick (Agus Hendra Yady, 2022:12), administrasi publik berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Konsep Teori Organisasi Publik

Menurut Menurut Waldo (Zulkifli 2005: 26), organisasi adalah sebuah sistem hubungan antara individu yang dibentuk berdasarkan aturan formal dan kebiasaan yang berlaku dalam sistem tertentu.

Sementara itu, Massie (Zulkifli 2005: 64) menjelaskan bahwa organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang memiliki tujuan bersama, yang menjadi pengikat dalam pekerjaan mereka serta memotivasi mereka untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai tujuan tersebut.

3. Konsep Teori Manajemen Publik

Manajemen berasal dari kata dalam bahasa Prancis Kuno "management," yang bermakna "seni melaksanakan dan mengatur." Kata ini kemungkinan memiliki akar dari istilah Italia "maneggier," yang berarti "mengendalikan," terutama dalam konteks mengatur kuda. Dalam bahasa Latin, ditemukan kata "manus," yang berarti "tangan." Istilah ini kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris sebagai "to manage" (kata kerja) dan "management" (kata benda), keduanya memiliki arti seni mengelola dan mengatur. Di Indonesia, istilah "management" diterjemahkan menjadi "manajemen," yang berarti pengelolaan, sedangkan kata "manajer" digunakan untuk menyebut individu yang melakukan manajemen.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (1995:9) manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sedangkan Nawawi (2008:40) menengahkan 3 (tiga) pengertian sumber daya manusia sebagai berikut:

1. SDM adalah Manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. SDM adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. SDM adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non-material/non-finansial) dalam organisasi yang dapat di wujudkan menjadi potensi nyata (raal) secara fisik dan non- fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

5. Konsep Efektivitas

Menurut Sedarmayanti (2019), efektivitas adalah Salah satu ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu tujuan dapat dicapai adalah efektivitas. Menurut definisi ini, indikator utama efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan keberhasilan suatu proses atau kegiatan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. baik kualitatif maupun kuantitatif.

6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (dalam Aprillia Theresisa, 2015; 93) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Menurut Subejo dan Supriyanto (2005:96) proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan,

memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui tindakan kolektif dan jaringan sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan Efektivitas Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu. Peneliti berupaya menyajikan analisis serta informasi yang mendalam mengenai objek atau subjek penelitian, sehingga dapat diidentifikasi kejadian-kejadian yang bersifat relatif dan dihasilkan gambaran yang jelas dari hasil analisis yang dilakukan. kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Pemilihan tipe deskriptif oleh peneliti sangat relevan karena memungkinkan penyajian gambaran yang rinci dan terperinci tentang fenomena yang diteliti. Deskripsi yang mendalam membantu pembaca memahami subjek penelitian secara lebih jelas serta menyederhanakan informasi yang kompleks. Selain itu, pendekatan deskriptif memungkinkan eksplorasi emosi dan persepsi subjek penelitian, menjadikannya metode yang efektif untuk menyampaikan data kualitatif yang kaya. Deskripsi yang baik membuat penelitian menjadi lebih menarik, mendukung argumen, dan memperkuat hasil temuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang dirancang untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan.

Teknik analisis data deskriptif menurut Miles dan Huberman berfokus pada menggambarkan data kualitatif secara sistematis dan menyeluruh, Tahapan-tahapan analisis data terdiri dari:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas adalah salah satu ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu tujuan dapat dicapai adalah efektivitas. Menurut definisi ini, indikator utama efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan keberhasilan suatu proses atau kegiatan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, baik kualitatif maupun kuantitatif (Sedarmayanti. 2019). Dalam melihat efektivitas Program Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir di gunakan 5 indikator efektivitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program adalah ukuran atau penilaian tentang sejauh mana kemampuan dari pelaksana suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-

program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Keberhasilan program dapat ditinjau dari pencapaian target program dan meningkatnya perekonomian.

Hasil wawancara dan observasi langsung peneliti di Desa Sungai Guntung Hilir, terlihat bahwa keberhasilan program dalam pencapaian target program dari pelaksanaan program peternakan di tingkat masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir menunjukkan kurang efektif. Hal ini terlihat dari pengamatan peneliti keberhasilan program belum sepenuhnya berhasil karena tidak adanya tindak lanjut program. Pelaksanaan program masih mengalami beberapa kendala yang menghambat keberhasilannya, hal ini terlihat bahwa bantuan bibit yang di berikan pemerintah desa dalam penyelenggarannya masih kurang optimal dalam memberikan pemahaman program kepada masyarakat. Meskipun Program ini secara khusus berperan penting dalam upaya mitigasi dampak ekonomi pasca-PHK massal akibat pandemi dan pengurangan tenaga kerja karyawan dari PT TIRTASARI. Namun, terlihat dari segi penyampaian informasi terbatas mengenai program pemberdayaan dan pelatihan. Informasi belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga beranggapan program ini bersifat sesaat saja sebagai bantuan akibatnya keberhasilan program kurang mencapai target yang di tentukan sebelumnya. Penyampaian informasi yang efektif sangat berperan dalam keberhasilan program karena berkaitan pemahaman bagaimana masyarakat merespon atau berpartisipasi pada program tersebut.

Dari pemerintah desa, program pemberdayaan tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi demi keberhasilan program dalam pencapaian target sebelumnya. Kepada Desa dan Aparat Desa Sei Guntung Hilir hendaknya menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat serta pemantauan program, agar meningkatkan minat masyarakat demi keberhasilan program serta adanya program yang berkelanjutan juga setelah dilaksanakan program tersebut. Tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga dampak dari adanya program tersebut belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program yang dilaksanakan masih belum efektif, karena hanya sebatas pemberian pengetahuan pas di awal saja dan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan tergantung dari masyarakatnya bagaimana menerapkan pengetahuan yang mereka dapat dari pelatihan.

Keberhasilan program yaitu agar suatu program berhasil maka dapat di jalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang di tetapkan (Arief Budiman. et. al, 2024). Dalam Konteks ini, bisa di lihat indikator keberhasilan program, program di jalankan sesuai rencana, dengan kemampuan adaptasi bila ada kendala.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan Sasaran adalah ketepatan dalam memberikan bantuan program pemberdayaan oleh pelaksana program terhadap mereka yang dianggap sangat layak untuk mendapatkan bantuan berdasarkan beberapa kriteria kelayakan serta kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan anggota peternak (masyarakat). Keberhasilan sasaran merupakan ukuran atau penilaian tentang sejauh mana sasaran program atau kegiatan telah tercapai sesuai dengan kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ketepatan sasaran dapat menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat keefektifan program.

Hasil observasi langsung dan wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan menunjukkan indikator keberhasilan sasaran belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan distribusi dalam pemerataannya belum semua masyarakat dapat merasakan bantuan program bantuan program peternakan. Ketepatan sasaran program merupakan Kemampuan suatu program untuk tepat dan memenuhi kebutuhan saat ini sambil berkonsentrasi pada tujuan yang diinginkan tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Warga dusun seberang merasa kurang menerima manfaat program. Ini menunjukkan lemahnya strategi dalam penyaluran distribusi dan pendekatan masyarakat yang berada di dusun Makmur. Meskipun demikian, secara kriteria penerima program sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan dari pemerintah Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberhasilan sasaran yaitu kemampuan suatu program tepat dan sesuai kebutuhan yang ada dan berfokus pada target yang diinginkan tanpa menyimpang dari sasaran yang ditentukan (Fahreza Rafiki et,al 2024). Dapat disimpulkan program hendaknya di arahkan ke kelompok atau individu yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan spesifik dari program tersebut.

a. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program adalah perasaan senang atau puas yang dirasakan penerima manfaat setelah membandingkan hasil atau kinerja program dengan harapan mereka sebelumnya. Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna.. Secara sederhana, kepuasan ini mencerminkan sejauh mana program mampu memenuhi kepuasan/manfaat program dalam mengentaskan kemiskinan.

Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditetapkan kepuasan program bagi masyarakat yang menerima program tersebut. Program peternakan ini memberdayakan masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti di tahap awal program sebagai bantuan warga desa yang terdampak phk PT Tirtasari akibat pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Namun, kepuasan Program peternakan belum diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat penerima. Akan tetapi, keberhasilan dalam mengelola juga sangat bergantung pada keseriusan dan motivasi individu penerima. Ini menunjukkan dari hasil lapangan komitmen dari pihak pelaksana program kegiatan dan masyarakat untuk saling bersinergi agar program peternakan berjalan secara optimal.

Kotler dan Keller (2009), Kepuasan program adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau ekspektasi terhadap layanan dengan kinerja aktualnya. Dalam konteks ini, kepuasan program terjadi bila pelaksanaan dan hasil program memenuhi atau melampaui harapan penerima manfaat.

b. Tingkat Input dan Output

Input merujuk pada semua sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program, seperti anggaran, tenaga kerja, sarana, dan prasarana. Output adalah hasil langsung yang diperoleh dari penggunaan input tersebut, misalnya jumlah penerima manfaat yang dilayani. Kesimpulan keduanya yaitu input seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung proses pelaksanaan program sehingga dapat menghasilkan output yang optimal,

yaitu jumlah penerima manfaat yang sesuai atau bahkan melebihi target.

Dalam melaksanakan setiap program membutuhkan biaya operasional dan terkait kegiatan program peternakan di Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tentu membutuhkan biaya atau dana yang tidak sedikit. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah desa bahwa sumber pendanaan dari Program peternakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa sebagai penyelenggara program dapat di jelaskan tingkat input pada program ini sudah cukup baik paa aspek dasar secara fisik seperti kandang dan bibit. Namun, masih lemah pada aspek pendukung yaitu non fisik misalnya pengetahuan dan pendampingan. Kerja sama antara bantuan fisik dan peningkatan kapasitas warga harus di berikan misalnya melalui penyuluhan/ sosialisai secara rutin. Ini menjadi fakto penting agar pemahaman masyarakat akan tujuan program. Pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa hambatan yang berhubungan dengan Efektivitas Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu di antaranya:

1. Salah satu faktor terpenting yang akan berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan program adalah sumber daya manusia. Untuk kelancaran suatu koordinasi di butuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusia yang handal sebagai pengelola yang professional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengeloan peternakan.
2. Sumber manusia yang kurang memadai seperti kurangnya kinerja tim pengawas dari pemerintah desa dalam memberikan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu di perlukan pembinaan dan pelatihan agar dalam tugasnya mampu dan dapat di rasakan baik oleh masyarakatnya.
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar sehingga ternak tidak berkembang dengan optimal. Kurangnya kegiatan sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami sepenuhnya manfaat dan tata cara program.
4. Tidak adanya tindak lanjutan program atau pemantauan program secara berkala. Semua masyarakat merasakan manfaat program walaupun secara kriteria sudah tepat sasaran. Namun, masih ada masyarakat yang belum kebagian.
5. Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi , Tidak ada evaluasi yang berkelanjutan atas keberhasilan atau kegagalan kelompok penerima bantuan.
6. Koordinasi Antar Pihak yang belum optimal sinergi antara pemerintah desa dalam menyelenggarakan program dengan masyarakat sebagai penerima perlu di tingkatkan.
7. Keterbatasan Data dan Informasi data peternakan sering kali kurang tersedia atau belum di manfaatkan secara optimal.Minimnya akses terhadap informasi membuat perencanaan program kurang efektif.
8. Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan. Desa hanya mengandalkan annggran APBDes tnpa ada bantuan dari swasta atau perusahaan sekitar desa, sehingga program terbatas dan tidak merata dalam memberikan bantuan.
9. Antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam program masih rendah karena minimnya informasi dan kepercayaan terhadap program. Sehingga sebagain masyarakat berpikiran bantuan ini tidak lah begitu besar dalam menambah pendapatan yang menyebabkan bantuan di berikan tapi tidak berkembang biak.

10. Tantangan teknis dalam pelaksanaan program Bibit ternak yang diberikan sering terserang penyakit dan belum ada upaya maksimal menyebabkan gagalnya pemeliharaan dan pengembangan ternak yang diberikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu kurang efektif. Namun, cukup mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan belum efektifnya Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Hal ini di karenakan di lihat dari sisi program yang di laksanakan memberi dampak positif bagi masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir, kemudian dilihat dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan menunjukkan bahwa dampak program peternakan bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga dengan mengelola bantuan yang di berikan. Namun, dari segi pelaksanaannya dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir masih tergolong minim. Ditinjau dari sisi ekonomi, program ini belum mampu secara signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun bantuan telah disalurkan, pengelolannya belum optimal sehingga tidak memberikan perubahan yang berarti dalam kegiatan ekonomi keluarga. Sebagian besar masyarakat belum merasakan kenaikan penghasilan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa program peternakan yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif. Selain itu, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat di bidang peternakan juga belum terlihat secara merata, yang menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program ke depan.

Untuk mengetahui kesimpulan setiap indikator mengenai Efektivitas Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Keberhasilan Program berada pada kategori cukup efektif, hal ini di karenakan Program peternakan belum berjalan efektif karena masih menghadapi berbagai kendala, kurangnya pendampingan teknis bagi peternak, minimnya edukasi dan pelatihan, kurangnya pengawasan dan pembinaan di lapangan terkait pengelolaan hewan ternak sehingga hanya Sebagian yang berhasil membudidayakan ternak. Namun, program membantu warga dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam produktivitas ternak dan pendapatan keluarga. Dalam hal ini, masyarakat menjadi lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi seperti pengangguran, phk, dan menjadi penghasilan skala kecil perekonomian masyarakat serta meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil peternakan yang dijalankan.
2. Indikator Keberhasilan Sasaran berada pada kategori kurang efektif, hal ini di karenakan secara keseluruhan masyarakat penerima program belum merata terutama di dusun Makmur. Namun, secara kriteria sudah tepat sasaran.
3. Indikator Kepuasan terhadap program berada pada kategori cukup efektif, hal ini di karenakan sejak awal program di mulai sudah memberikan manfaat sehingga program masih berlanjut sebagai tolak ukur program berhasil mengentaskan kemiskinan.
4. Tingkat input dan output berada pada kategori kurang efektif, hal ini di karenakan sarana yang di berikan sudah mencukupi untuk kebutuhan peternak seperti kandang

dan bibit. Namun, prasarana pendukung terbatas yaitu sosialisasi/peynyuluhan hanya di tahap awal penyaluran. Kemudian tidak adanya evaluasi lapangan seperti pendampingan atau pemantauan berkala.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh berada pada kategori cukup efektif, hal ini di karenakan program memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat dan setelah mengikuti program adanya kemandirian anggota peternak untuk mengembangkan pemahamannya sehingga masyarakat menjadi mandiri dalam kebutuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdoellah, Y Awan. (2016) *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Agustina. (2020). *Manajemen Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Ali Zaini, & Al Hafis Raden Imam, (2015). *Teori Kebijakn Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Amri Darwis. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Suska press.
- Arafat. (2023) *Kebijakan Publik;Teori dan Praktik*. Malang : PT. Lestari Nusantara Abadi Group.
- Aromatica, Desna & Sudrajat,rahman, arip. (2021). *Teori Organisasi*. Jawa Tengah : CV. Amerta Media.
- Astuti. (2019). *Pengukuran Kinerja dan Efektivitas*. Yogyakarta: Penerbit ABC.
- Fitharyyah, Ummul, Mustiqowati. (2021) *Dasar-dasar Teori Organisasi*. Jakarta : Institute for Research and Develpoment.
- Fitriani. (2015). *Dampak Lingkungan Terhadap Peternakan di Daerah Aliran Sungai*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Gamal, Merza. (2004). *Ekonomi Syariah*. Pekanbaru: UNRI Press
- Gamal, Merza. (2004). *Ekonomi Syariah*. Pekanbaru: UNRI Press
- Halim. (2018). *Teori dan Praktik Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit ABC.
- Hamid Darmadi 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Ifabeta : Bandung
- Hamid Darmadi. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta : Bandung
- Hamim Sufian., Adnan Muchlis Indra. (2005). *Organisasi dan Manajeme*.Pekanbaru: Afriadi
- Hamim, Sufian & ddk. (2005). *Organisasi dan Manajemen*. (TT).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Huda. (2015). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintahan Desa*. Jakarta: Jakarta Pusat : Taushia Keuangan
- Karta Sasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Karta Sasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta
- Maipita Indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Edisi satu*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Majid Jamaludin. 2023. *Manajemen Sektor Publik Konsep dan Teori*. Jawa Tengah : CV. Sketsa Media.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: And
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Mustari, N., & Ip, S. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Nawawi, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keempat. Penerbit Gajah Mada Pasalong Harbani.
- (2019) *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Daerah di Era Otonomi*. Buku I.
- Pranaka, A. M. W., & Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Pranaka, A. M. W., & Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Prijono, Onny S dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Prijono, Onny S dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Robbins, S. P. (2016). *Organizational Behavior*. Pearson.
- Salahudin. (2020). *Manajemen dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Sedarmayanti. (2011). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung
- Siregar, A., & Budi, S. (2017). *Analisis Efektivitas Program dalam Organisasi*. Bandung: Penerbit DEF.
- Siswanto, H.B. (2005) *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sitta, (2022) efektivitas Kinalang sebagai aplikasi pelayanan public berbasis elektronik di kota kotamobago
- Sitta, (2022) efektivitas Kinalang sebagai aplikasi pelayanan public berbasis elektronik di kota kotamobago
- Steers, M. (1985). *Effective Management: A Comprehensive Guide to Organizational Effectiveness*. New York
- Steers, M. (1985). *Effective Management: A Comprehensive Guide to Organizational Effectiveness*. New York
- Subejo, & Supriyanto. (2005). *Proses Pemberdayaan Masyarakat: Upaya untuk Memfasilitasi Masyarakat Lokal*. Jakarta
- Subejo, & Supriyanto. (2005). *Proses Pemberdayaan Masyarakat: Upaya untuk Memfasilitasi Masyarakat Lokal*. Jakarta
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA,CV.
- Sugiyono. (2020). *Praktik Peternakan di Pedesaan: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Penerbit ABC.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta: Bandung
- Suharsimi Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sutrisno. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Syafri Wirman,. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.

- Syam. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Efektivitas*. Surabaya: Penerbit GHI.
- Ulfa. (2021). *Pengetahuan Peternak dan Praktik Budi Daya Ternak di Desa*. Yogyakarta: Penerbit ABC.
University, Press Yogyakarta.
- Zohriah. (2017). *Manajemen Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. (2024). *Kecamatan Rengat Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Indragiri Hulu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. (2024). *Kecamatan Rengat Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Jurnal:

- Ara Lili, Marselina. (2018). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Herman, H., Suriani, L., & Gultom, E. W. B. (2023). Efektivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 118-133.
- Herman, Rosmita, and Idam Ridho. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Dalam Budidaya Madu Kelulut Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu." 6(1):85– 101.
- Sugiyono. 2020. Partisipasi masyarakat dalam memelihara hewan ternak berdasarkan Perda nomor 04 tahun 2015 tentang tertib hewan ternak dan hewan peliharaan [internet]. [diunduh pada: 18 April 2022]. Tersedia pada: <http://repository.uinjambi.ac.id/5806/1/Sugiyono.pdf>
- SYAM, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128–152. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.378>
- Syapril Abdullah, Hermana, Indra Safrib, Kartius. 2023." Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar." 242-248.
- Ulfa SM. 2021. Analisis korelasi karakteristik peternak dengan kompetensi usaha ternak sapi Bali di Desa Dataran Bugi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah [Internet]. [diunduh pada 20 April 2022]. Tersedia pada: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/17860-Full_Text.pdf
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu*

- Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu*

- Administrasi Publik, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Sosio Konsepsia, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). Jurnal Wacana, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terbaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. Gema Publica, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. Jurnal Niara, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). VALUTA, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province,

- Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau

- Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of

- collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilihan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sehati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim,

- S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*,

- 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU

- KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9. Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126. Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Regulasi

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan arahan agar pemerintah desa dapat menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan berbasis potensi lokal, salah satunya melalui pengembangan peternakan rakyat.